

Penguatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wal Tamwil

Bayu Wardhana

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : bayuwardhanaumsida@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan tersebut tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0 %. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disumbang dari sektor umkm. Di tahun 2013 umkm mampu menyumbang PDB Indonesia sebesar 56,6 %. Namun disisi lain masih terjadi permasalahan klasik yang seringkali dialami oleh umkm yaitu masalah permodalan. Oleh karena itu lembaga keuangan mikro syariah yang hal ini adalah Baitul Maal Wal Tamwil harus dapat menjadi penguat dalam permodalan UMKM di Indonesia melalui produk-produk dan akad yang dibuat oleh BMT.

Keywords : UMKM,Penguatan,BMT

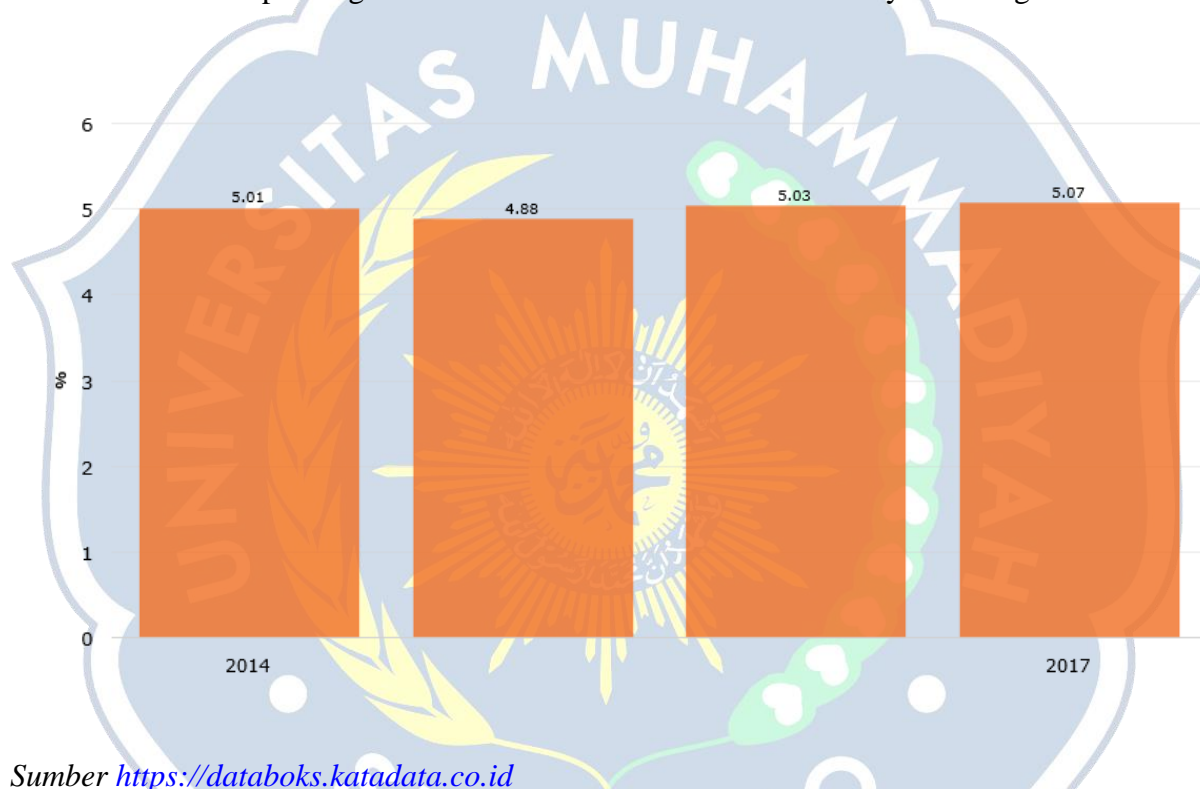
Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan tumbuh meningkat tetapi pertumbuhan tersebut juga tidak terlalu signifikan. Pada lima tahun terakhir perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2016 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,0 %. Tetapi angka pertumbuhan tersebut masih dibawah angka pertumbuhan yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 5,20 %. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,9 % (Rozycki&Grace, 2017).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat dibuktikan melalui catatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh world bank. Pada laporan tersebut,dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat apabila dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat,China dan Malaysia. Seperti contoh negara Malaysia pada tahun 2016 perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,2 % sedangkan pada tahun 2015 perekonomian tumbuh sebesar 5,0 % hal ini menunjukkan penurunan peningkatan perekonomian Malaysia. Penurunan pertumbuhan perekonomian ini juga dialami oleh

negara-negara besar seperti China. Pada tahun 2016 perekonomian China tumbuh sebesar 6,7 % sedangkan pertumbuhan perekonomian China pada tahun 2015 tumbuh sebesar 6,9 % (<http://www.worldbank.org>).

Selain itu dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibilang cukup fluktuatif. Artinya adalah terjadinya ada kenaikan dan penurunan pertumbuhan dalam empat tahun terakhir. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tumbuh melamban dengan terjadinya fluktuatif pertumbuhan pada ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dihimpun oleh kata data Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga tahun terakhir antara tahun 2014-2017 yaitu sebagai berikut:



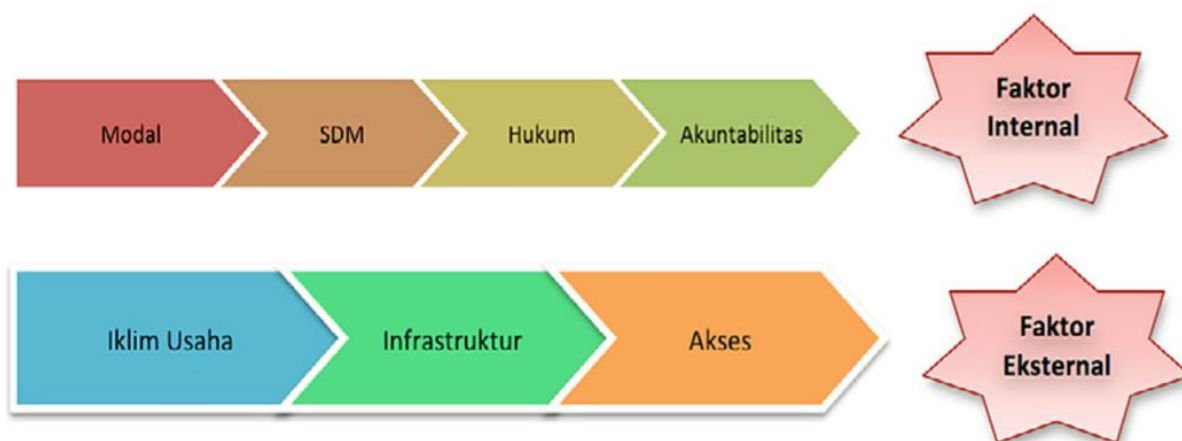
Sumber <https://databoks.katadata.co.id>

Dari data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antara tahun 2014 sampai 2017 terjadi fluktuatif pertumbuhan yang dapat dilihat pada data tersebut pada tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 yaitu sebesar 0,13%. Melihat pertumbuhan ekonomi di atas tentunya masih terbilang cukup jauh dari target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Melihat pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang dapat dikatakan fluktuatif dan melamban maka diperlukan solusi yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu sektor yang harus didukung agar dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia

adalah sector usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan istilah umkm. Kita tahu bahwa umkm ini mempunyai kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan banyak menyerap tenaga kerja sehingga pada akhirnya nilai pengangguran akan berkurang dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh (Wiliasih, 2013)

Kendati demikian masih banyak masalah klasik yang dialami oleh umkm yang ada di Indonesia. Masalah tersebutlah yang menyebabkan pertumbuhan umkm tidak maksimal. Masalah tersebut terdiri dari masalah internal dan eksternal yang berada di umkm. Pada masalah internal dan eksternal terdiri dari beberapa masalah yang muncul diantaranya terdiri dari beberapa masalah antara lain:



Sumber LPPM

Dari bagan tersebut terdiri dari masalah internal dan eksternal yang ada didalam umkm, salah satu masalah klasik yang selalu timbul dari umkm yang ada di Indonesia adalah masalah internal yaitu masalah permodalan. Masalah permodalan ini yang selalu dialami oleh pelaku umkm maka diperlukan suatu solusi untuk dapat mengatasi permasalahan penguatan permodalan umkm tersebut. Penguatan permodalan ini perlu dilakukan agar umkm tetap tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu solusi penguatan permodalan umkm adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah yang salah satunya adalah baitul maal wal tamwil atau bmt. Bmt dapat menjadi solusi penguatan permodalan bagi bmt adalah karena tujuan utama BMT adalah karena sasaran utama penyaluran dana dari BMT adalah sektor umkm (Raya, 2013). Selain itu dilihat dari fungsi BMT sangat cocok apabila penguatan permodalan umkm melalui bmt karena fungsi bmt salah satunya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

pada sektor nonprofit seperti penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan penyaluran bersifat profit seperti penyaluran pembiayaan permodalan umkm (Nafik, 2016). Oleh karena itu perlu adanya sinergitas hubungan antara bmt dan umkm sehingga penguatan permodalan umkm melalui lembaga keuangan mikro syariah khususnya bmt dapat terlaksana.

Tinjauan Pustaka

1. Baitul Maal Wal Tamwil

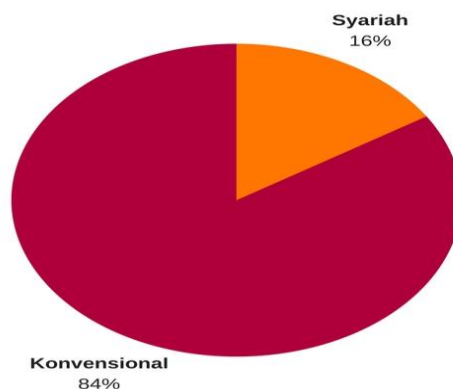
Konsep mengenai BMT telah ada pada zaman rasulullah dan puncak kejayaannya adalah pada masa khulafaur rasydin umar bin Khatab RA pada saat itu BMT telah menjadi suatu lembaga keuangan yang mampu tumbuh dan berdiri sendiri (Sholahuddin, 2011). BMT diambil dari kata Balai Unit Mandiri Terpadu atau dalam istilah bahasa arab disebut dengan Baitul Maal Wal Tamwil yang merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan atau berprinsip pada nilai-nilai syariah (Soemitra, 2016). Diindonesia sendiri BMT dikenal masyarakat dengan lembaga keuangan mikro syariah yang fungsi utama BMT adalah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tidak heran apabila nasabah pembiayaan BMT untuk sektor lending adalah para pelaku umkm. Diindonesia juga dikenal dengan adanya koperasi syariah lalu timbul suatu pertanyaan apa perbedaan dari koperasi syariah dengan BMT?

Secara system operasional BMT dengan koperasi syariah tidak ada perbedaan sedangkan apabila ditinjau dari sudut badan hukum BMT dan koperasi syariah juga sama yaitu berbadan hukum koperasi dalam segala kegiatan operasional kedua lembaga keuangan tersebut (Yusar Sagara, 2016). Dalam prespektif hokum yang berlaku kedua lembaga keuangan ini dinaungi oleh Undang-Undang No 17 Tahun 2013 yang isinya menyatakan bahwa kedudukan BMT sama halnya dengan koperasi (Murdiana, 2016). Oleh karena itu dari analisis hokum BMT dan koerasi syariah dan system operasional tidak ada perbedaan.

Pertumbuhan BMT maupun koperasi syariah diindonesia bisa dibilang belum cukup tumbuh dengan pesat tidak seperti halnya koperasi konvensional yang tumbuh meningkat dari tahun ketahunnya. Hal ini dibuktikan dengan rekap data pertumbuhan koperasi syariah dan BMT dengan pertumbuhan koperasi konvensional yang ada diindonesia yaitu sebagai berikut:

DATA KOPERASI SYARIAH & BMT SELAMA BULAN OKTOBER 2017

- Jumlah koperasi 175
- Jumlah koperasi konvensional 147
- Jumlah koperasi syariah & BMT 28



Data diolah dari Direktori LKM Oktober 2017

Sumber <https://www.ojk.go.id>

Dari data diatas dapat dilihat dan dianalisis bahwa pertumbuhan koperasi dan BMT tidak sepesat koperasi konvensional. Untuk jumlah koperasi syariah dan BMT hanya 28 lembaga sedangkan untuk koperasi konvensional jumlah 147 lembaga, terjadi ketimpangan dan GAP pertumbuhan diantara kedua lembaga tersebut. Hal ini disebabkan karena kurang tahunya masyarakat dengan lembaga keuangan syariah khususnya BMT dan koperasi. Oleh karena itu perlu adanya literasi tentang lembaga keuangan syariah agar masyarakat dapat mengetahui tentang lembaga keuangan syariah.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha menengah kecil mikro merupakan salah satu sektor yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi dinegara ini. Pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh tinggi karena salah satunya adalah didukung oleh umkm yang tumbuh pesat juga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pengertian umkm yaitu sebagai berikut Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU no 28 tahun 2008). Didalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk mengembangkan dan menumbuhkan umkm dan menyediakan permodalan bagi para pelaku umkm. Oleh karena itu umkm dan lembaga keuangan selaku penyalur modal bagi umkm tentunya tidak dapat

terlepaskan dan diharapkan terus bersinergi agar dapat mengatasi problematika permodalan yang dihadapi pada saat ini.

Penelitian Terdahulu

Renny (Oktafia, 2017) dalam penelitian yang berjudul percepatan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui perkuatan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Jawa Timur ini membahas bahwasannya peran lembaga keuangan mikro syariah tidak dapat terpisahkan dari UMKM dan percepatan pertumbuhan UMKM ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Oleh karenanya dalam memberikan layanan kepada UMKM maka diperlukan penguatan lembaga keuangan syariah (LKMS) khususnya di Jawa Timur.

Yusar Sagara (Yusar Sagara, 2016) dalam penelitian ini membahas mengenai penguatan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui Baitul Maal Waal Tamwil (BMT). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa fungsi adanya BMT dapat meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan permodalan yang diberikan BMT mendorong masyarakat menciptakan usaha-usaha baru. Penguatan ekonomi masyarakat ini akan memberikan dampak positif bagi perokonomian nasional dan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Metodelogi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif dimana pada penelitian ini banyak mendeskripsikan tentang peran BMT bagi UMKM. Yang dimana metode kualitatif adalah suatu kebiasaan keilmuan yang didasari oleh pengamatan manusia. Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus yang dimana menurut Creswell (1998) studi kasus adalah suatu kasus yang diamati dengan informasi secara terperinci pada suatu objek tertentu dalam suatu tempo tertentu. Pada studi kasus ini kami memperoleh informasi melalui salah hasil penelitian berupa jurnal, artikel dan berita mengenai permasalahan permodalan umkm dan solusi yang ditawarkan.

2. Rancangan Penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan tentunya dibuat sebuah rancangan penelitian yang berguna untuk penelitian. Tahapan awal adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Proses identifikasi ini didapatkan dari proses observasi pada objek tertentu. Objek observasi pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu umkm dan BMT. Setelah melakukan observasi dengan membaca penelitian dan referensi yang

ada maka ditemukanlah sumber permasalahan yang sering dialami oleh umkm tersebut yaitu mengenai permasalahan modal. Dan sebagai solusi yang ditawarkan adalah peran lembaga keuangan syariah yaitu BMT.

3. Objek Penelitian

Didalam penelitian tentunya dibutuhkan suatu objek penelitian yang berguna dalam kegiatan studi kasus. Menurut Spradley dalam (Sugiono, 2014) Objek penelitian adalah situasi kondisi social yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu antara pelaku dan peristiwa alam yang dapat diamati. Oleh karena itu didalam penelitian ini mengenai permasalahan klasik yang dialami oleh umkm diindonesia.

4. Pengumpulan Data

Awal mula untuk mencari data yang diperlukan maka dibuatlah kerangka berpikir mengenai penelitian apa yang akan dilakukan dan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dan data yang diterbitkan oleh lembaga instansi terkait seperti ojk, bank Indonesia dan lainnya. Data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan umkm diindonesia, data perekonomian, data koperasi dan BMT.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang artinya adalah menjelaskan mengenai data-data yang berasal dari sebuah penelitian. Tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data dan mulai mencari sumber permasalahan dan mencari solusi yang dapat ditawarkan.

Pembahasan

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Pertumbuhan Ekonomi

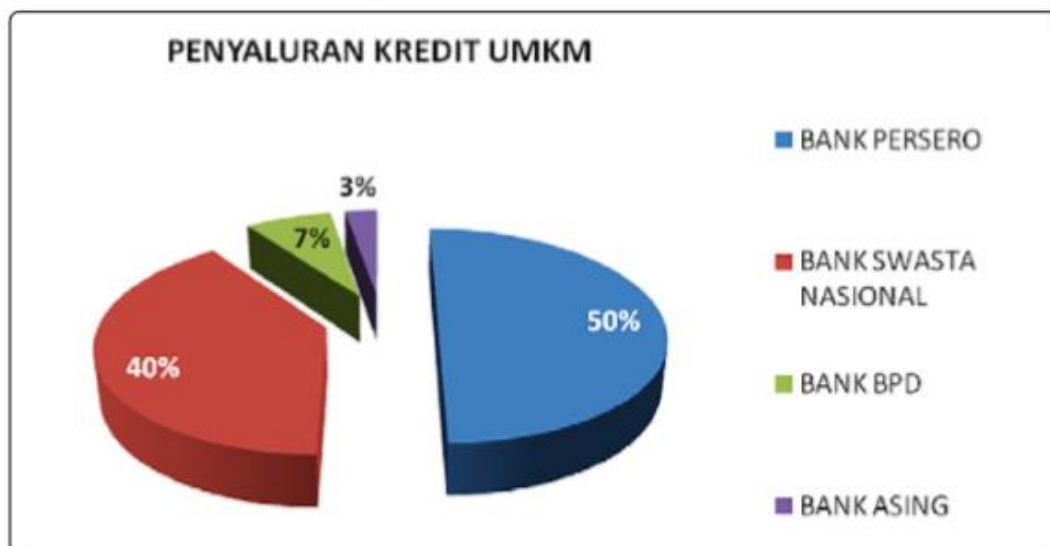
Usaha mikro kecil menengah atau umkm turut andil dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas selain itu umkm juga dapat mengentaskan kemiskinan sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat berkurang (Chrismardani, 2014). Disisi lain pemerintah juga mendukung akan pertumbuhan umkm di Indonesia melalui paket kebijakan ekonomi pada tahun 2016 salah satunya adalah akses pembiayaan umkm melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) (OECD, 2016). Paket kebijakan ini adalah untuk memberikan solusi yang kerap dialami oleh umkm yaitu permodalan. Menurut data yang dihimpun oleh Bank Indonesia (BI) selama bulan april 2017 pembiayaan yang disalurkan pada umkm sebesar 908,943 Milyar (Indonesia, 2017). Menurut Beck et.al dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang pembiayaan usaha mikro berkisar diantara angka 30-40 % sedangkan pada negara maju

pembiayaan usaha mikro berkisar diantara 70 % keatas (International Financial Corporation, 2016). Untuk itu Bank Indonesia membuat jasa layanan keuangan melalui produk pembiayaan tanpa anggunan diharapkan produk ini dapat mengatasi problematika pembiayaan usaha mikro di Indonesia (Indonesia, 2016). Oleh karena itu UMKM berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia selain itu pemerintah juga memberikan dukungan melalui program permodalan kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu umkm juga menyumbang terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar 57,6 % dan berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 96,9 di tahun 2013 (Umkm & Indonesia, 2016)

Kondisi Permodalan Umkm Indonesia

Salah satu kendala kurang berkembangnya umkm diindonesia terletak pada permasalahan permodalan. Alasan umkm karena sulit mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan karena sulitnya dalam melengkapi persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan. Selain itu faktor pendidikan para pelaku umkm inilah yang menyebabkan umkm sulit mendapatkan permodalan (Oktafia, 2014). Kredit umkm ini masih didominasi oleh lembaga perbankan hal ini ditunjukkan dengan laporan baki kredit umkm yang dihimpun oleh bank Indonesia adalah sebesar 4,5 Milyar (Indonesia, 2017). Penyaluran tersebut terbagi atas beberapa bank antara lain bank perseroan, bank swasta nasional, bank bpd dan bank asing. Hal ini bisa ditunjukkan pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.1. Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2014



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dari data diatas dapat dianalisa bahwa penyaluran kredit umkm terbesar disalurkan oleh bank perseroan sebesar 50 % dan kedua ditepati oleh bank swasta nasional sebesar 40 %

dalam grafik tersebut penyaluran kredit didominasi oleh lembaga perbankan (Bank Indonesia, 2015).

Meskipun dengan persyaratan pengajuan permodalan umkm yang diberikan oleh perbankan para pelaku umkm masih banyak yang melakukan pengajuan permodalan kepada pihak perbankan seharusnya lembaga keuangan mikro yang segmentasi pasarnya adalah para pelaku umkm seharusnya dapat mendominasi terhadap penyaluran umkm. Selain itu lembaga keuangan mikro dengan kelebihan yaitu proses pengajuan administrasi dan permodalan umkm yang cukup mudah yang dapat mempercepat laju pertumbuhan umkm (Oktafia, 2017). Seharusnya dapat mendominasi dalam penyaluran permodalan umkm sehingga lembaga keuangan mikro seperti *baitul maal wal tamwil* dapat berkembang.

Penguatan Permodalan UMKM

Diatas telah disinggung bahwa penyaluran permodalan umkm masih didominasi oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah khususnya bmt harus bisa ikut menyalurkan permodalan umkm ini. Dengan kelebihan bmt yaitu syarat administrasi yang mudah seharusnya dapat menjadi lembaga yang dapat menguatkan permodalan umkm sehingga permasalahan permodalan umkm dapat teratasi. Penguatan permodalan ini dapat melalui produk-produk BMT seperti produk pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama produktif yaitu akad musyarakah maupun mudharabah. Selain itu juga ada kerjasama non produktif seperti pemberian pinjaman kepada pelaku usaha UMKM dengan menggunakan akad *qardh* (Oktafia, 2017). Melalui produk pembiayaan ini diharapkan dapat membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain itu BMT juga membawa suatu nilai islam sehingga apabila BMT ini turut andil dalam system penguatan permodalan dan keberlangsungan umkm maka BMT dapat menerapkan nilai-nilai islam tersebut sehingga usaha yang dibiayai oleh BMT dapat menjadi usaha yang membawa keberkahan (Oktafia, 2014).

Simpulan

Umkm sebagai salah satu sektor yang menyumbang terhadap PDB Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Melalui Umkm inilah dapat menyerap tenaga kerja sehingga permasalahan pengangguran diindonesia dapat teratasi. Tetapi terdapat permasalahan klasik yang selalu dialami oleh Umkm. Oleh karena itu lembaga keuangan mikro syariah yang khususnya BMT harus dapat menjadi lembaga penguat permodalan Umkm. Penguatan permodalan Umkm melalui BMT dapat dilakukan melalui produk-produk BMT yang dilandaskan pada akad-akad yang ada di BMT.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Bank Indonesia dan LPPI. Jakarta.
- Chrismardani, Y. (2014). Komunikasi Pemasaran Terpadu : Implementasi Untuk Umkm. *Jurnal NeO-Bis*, 8(2), 176–189.
- Indonesia, B. (2016). *Laporan Perekonomian INDONESIA 2016*. Jakarta.
- Indonesia, B. (2017). *PERKEMBANGAN BAKI DEBET KREDIT USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH (UMKM) PERBANKAN*. Jakarta.
- International Financial Corporation. (2016). *UKM yang dimiliki Wanita di Indonesia : Kesempatan Emas untuk Institusi Keuangan Lokal*. Jakarta. Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/737221477568795492/pdf/109534-WP-BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-PUBLIC.pdf>
- Murdiana. (2016). Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 2(1), 271–294.
- Nafik, H. P. P. (2016). Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Di Bmt Mandiri Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(4), 325–332.
- OECD. (2016). *Survei Ekonomi OECD INDONESIA*. Jakarta. Retrieved from <https://www.oecd.org/eco/surveys/indonesia-2016-OECD-economic-survey-overview-bahasa.pdf>
- Oktafia, R. (2014). PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MORAL MASYARAKAT DI KAWASAN DOLLY SURABAYA. *Jurnal An-Nisbah*, 01(01), 120–137.
- Oktafia, R. (2017). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Islam*, 03(110), 85–92.
- Raya, J. S. (2013). Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 29–50. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.29-50>
- Zoeycki&Grace. (2017). *Staying the course*. *American Surgeon* (Vol. 78). Indonesia. <https://doi.org/10.1055/s-0031-1278273>
- Sholahuddin. (2011). Pemulihan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Paska Bencana Alam Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Penelitian*, 3(1), 1–14.
- Soemitra, A. (2016). *Bank&Lembaga Keuangan Syariah*. (K. P. Utama, Ed.) (2nd ed.).

Jakarta: Prenadamedia Group.

Umkm, D. P., & Indonesia, B. (2016). *Pemetaan Dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 Dan Pasca MEA 2025*. Jakarta.

Wiliasih, L. A. P. E. A. (2013). Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah , Kabupaten Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(1), 56–67.

Yusar Sagara, M. A. P. (2016). Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (Bmt) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (Bumrt). *Social Science Education Journal*, 3(1), 81–91. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.4178>.Permalink/DOI

